

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Myanmar adalah sebuah Negara yang dipimpin oleh sebuah rezim diktator yang memperoleh kekuasaannya lewat kudeta pada tahun 1962. Semenjak adanya peralihan kekuasaan kepada militer seluruh aspek yang ada di Myanmar juga telah diambil alih oleh militer. Junta militer tidak hanya menguasai aspek pemerintahan tetapi juga menguasai seluruh aset perekonomian di Myanmar. Kebijakan – kebijakan Junta militer yang seringkali memancing kemarahan dunia internasional seperti banyaknya kekerasan yang digunakan oleh Junta militer setiap kali melihat adanya perlawanan pada pemerintahannya. Oleh karena itu rezim militer Myanmar dikenal sebagai rezim yang memiliki pelanggaran HAM yang tinggi dikawasan Asia Tenggara.

Adanya kecaman – kecaman dari luar tidak membuat Myanmar bersifat lebih terbuka. Hal ini malah mendorong Myanmar untuk cenderung menutup diri dari dunia luar. Karena sikapnya yang cenderung menutup diri maka politik Myanmar dinilai bersifat Isolatif. Oleh karena itu arus informasi yang berasal dari Myanmar pun sangat sulit untuk didapatkan. Kecenderungan politik Myanmar yang bersifat Isolatif ini disebabkan adanya kepentingan – kepentingan militer yang menguasai Myanmar. Dominasi militer yang sangat besar terhadap ekonomi Myanmar

membuat adanya kekhawatiran terhadap intervensi asing yang akan menggoyahkan kekuasaan Junta. Selain itu juga karena adanya kepentingan – kepentingan asing yang mendukung kepemimpinan Junta militer di Myanmar.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini dimana setiap Negara saling berhubungan serta adanya sistem pasar bebas, Myanmar malah memilih untuk bertahan dengan politiknya yang Isolatif. Oleh karena itu penulis menganggap masalah ini sangatlah menarik dan penting untuk dikaji dalam perpolitikan. Dalam kesempatan ini penulis memilih judul **“KEPENTINGAN MILITER DIBALIK POLITIK ISOLATIF MYANMAR”**

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Myanmar merupakan Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan telah menjadi salah satu anggota ASEAN sejak tahun 1967. Berdasarkan letak geografisnya Myanmar berada di Kawasan Asia Tenggara dan dikelilingi oleh lima negara dengan keanekaragaman yang berbeda – beda, kelima Negara tersebut adalah Cina, Bangladesh, Thailand, Vietnam dan India. Negara yang dulu bernama Burma ini dipimpin oleh rezim militer yaitu Junta Militer. Militer berkuasa di Burma sejak Jenderal Ne Win memimpin kudeta yang menggulingkan pemerintahan demokratis dibawah U Nu, pada tahun 1962.¹ Sejak dipimpin oleh rezim diktator rakyat Myanmar hidup dalam dalam penderitaan, hal ini menyebabkan banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Myanmar sendiri terhadap pemerintahan Junta militer yang

berkuasa. Rakyat Burma tidak tahan hidup dibawah ancaman senjata. Protes terhadap pemerintahan Junta militer meledak pada tahun 1988 ketika demonstrasi pro demokrasi besar – besaran pada 8 Agustus 1988 dan mulai di kenal dengan 8888.²

Politik Luar Negeri Myanmar dipengaruhi beberapa faktor penting. Pertama adalah sejarah. Sejarah Myanmar, dulu disebut Burma, penuh dengan perang yang nyaris tanpa henti. Proses pembentukan Myanmar secara tradisional berlangsung ditengah peperangan antar kelompok. Disamping itu, Myanmar dimasa lalu juga berhadapan dengan invansi dari luar yang dilakukan oleh pasukan Mongol, Cina dan juga Inggris. Kedua, pada era modern Myanmar berhadapan dengan kekuatan imperialis Jepang dan nyaris tak pernah luput dari perang saudara. Kondisi perang terus menerus ini membuat konsepsi keamanan nasional dipenuhi beban upaya mempertahankan kesatuan nasional dari ancaman dalam dan luar negeri. Ketiga, menurut Than adalah geografi. Myanmar dikelilingi lima Negara dan dua diantaranya adalah Negara etnis, budaya, dan agama walaupun didalamnya terdapat satu etnis dominan, Bamar, yang merupakan 69% dari seluruh penduduk Myanmar.³

Rezim Junta militer yang berkuasa di Myanmar sejak tahun 1962 sering mendapat kecaman dari dunia internasional, hal ini dikarenakan banyaknya kebijakan – kebijakan serta perilaku Junta militer yang dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta militer seperti:

² *ibid*

- Tindakan represif Junta militer dalam pada tahun 1988 dimana militer menggilas para demonstrans sehingga menewaskan 3000 orang.
- Pemberontakan etnis Karen, etnis minoritas terbesar kedua setelah Shan, dihadapi dengan brutalisme tanpa ampun yang telah merenggut ribuan jiwa.
- Kasus pemerkosaan yang melibatkan militer terhadap wanita etnis Shan.
- Pada tahun 1992, pembantaian terhadap suku Rohingnya yang merupakan suku minoritas di Myanmar.
- Penahanan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi tanpa proses pengadilan.
- Kekerasan terhadap demonstran yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2007.

Hal – hal seperti inilah yang seringkali membuat Myanmar dijatuhi sanksi dari dunia internasional maupun embargo ekonomi dari berbagai Negara. Akan tetapi sejumlah kalangan menilai sanksi itu tak banyak artinya bagi Junta. Karena Junta militer tidak sedikitpun melakukan perubahan kearah yang lebih baik dan malah berbalik menyalahkan pihak – pihak yang memberikan sanksi terhadap mereka atas hancurnya perekonomian Myamar.

Semenjak adanya kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win kepada pemerintahan U Nu pada tahun 1962, militer praktis memegang seluruh aspek yang

ada di Myanmar. Tidak hanya dalam aspek politik Junta militer berkuasa di Myanmar, Junta militer juga mengambil alih penguasaan atas sektor ekonomi. Segala usaha perekonomian di Myanmar dikuasai penuh oleh negara yang dalam hal ini adalah Junta militer. Penguasaan atas akses ekonomi diawali dengan mengambil alih pengelolaan aset – aset kolonial Inggris, seperti perusahaan pelayaran, perkebunan, gedung dan beragam industri lainnya. Pemerintahan Junta melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing. Rejim junta militer juga memiliki hak tanpa batas untuk mempekerjakan rakyat dengan upah minimum untuk kepentingan bisnis kelompok tersebut.

Kekuasaan Junta militer yang sangat besar terhadap perekonomian Myanmar membuat Junta berhak mengambil keputusan ekonomi tanpa mempedulikan nasib rakyatnya, seperti: mengumumkan bahwa lembaran uang kertas yang bernilai besar tidak lagi berlaku sehingga menghancurkan tabungan masyarakat yang mengakibatkan demonstrasi 1988. Demonstrasi yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1988 ini digerakkan oleh mahasiswa dan telah menelan korban hingga 3000 demonstran. Pada tahun 2007 pemerintah Junta militer membuat kebijakan yang sangat berani dengan mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar 500%. Kebijakan tersebut juga memancing kemarahan masyarakat Myanmar yang berdampak pada adanya aksi demonstrasi.

Semula aksi demonstrasi yang dimulai pada Agustus 2007 ini berjalan dengan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Demonstrasi ini diikuti 100.000 orang dan 20.000 orang diantaranya merupakan biksu. Tanggal 26 September 2007 militer memukul, melontarkan gas air mata, dan melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan biksu dan warga sipil di Yangon. Dalam peristiwa ini setidaknya 4 orang yang termasuk 3 biksu tewas dan 100 orang cedera. Sejak Junta bertindak keras kepada demonstran dalam tiga hari terakhir, setidaknya 13 orang tewas dalam peristiwa tersebut termasuk seorang wartawan kantor berita APF News Jepang Kenji Nagai. Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadi aksi berdarah seperti yang terjadi pada tahun 1988 yang menewaskan 3.000 demonstran.⁴

Setelah banyaknya kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Junta militer membuat Negara ini juga cenderung menutup diri dari pihak asing. Segala sesuatu yang berasal dari luar Myanmar sangat dibatasi oleh Junta militer. Termasuk membatasi arus informasi dari media asing. Oleh karena itu pada dekade tahun 1989 dan awal 1990 informasi – informasi yang berasal dari Myanmar sangat sulit didapatkan. Hingga saat ini politik Myanmar dikenal dengan politik Isolatif karena kecenderungannya yang tertutup kepada pihak luar.

Istilah Isolatif ini pertama kali digunakan tahun 1860, terkait politik isolasi Amerika. Isolasionisme, tulis *American Heritage Dictionary*, merujuk pada suatu kebijakan nasional yang absen dari hubungan ekonomi maupun politik negara-negara lain. Isolasionisme menegaskan sikap yang tak mau intervensi, baik terhadap militer

⁴ Kompas, "Junta Tembak Demonstran" diakses 27 September 2007

maupun politik mancanegara. Tak mau ikut perang, tak mau kirim serdadu ke negeri asing. Perekonomiannya pun proteksionis, semata-mata perlindungan pada ekonomi domestik alias proteksionis. Karena itu isolasionisme tak mau pusing semua yang terjadi di negara lain dan sebaliknya tidak mau dalam negerinya diganggu atau direcoki oleh pihak luar. Jangan campuri urusan internal negeri lain, urusan domestik cukup serahkan pada pihak masing-masing.⁵

Sungguh unik melihat adanya Negara yang masih bersifat Isolasi pada era globalisasi seperti sekarang ini. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias.⁶ Pada era globalisasi seperti sekarang ini Junta militer Myanmar masih tetap mempertahankan politik isolatifnya. Berbagai sikap telah ditunjukkan oleh Junta militer, sejak dipimpin oleh rezim militer Junta melarang adanya arus informasi yang keluar masuk Myanmar. Pemerintah militer pun mempunyai hak untuk melakukan sensor terhadap pemberitaan – pemberitaan yang akan dipublikasikan. Sehingga tingkat aspirasi rakyat dinegara ini pun menjadi rendah.

Aktifitas – aktifitas yang dapat menentukan karakteristik suatu bangsa seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemilihan umum secara teratur dan

⁵ <http://rpohan.wordpress.com/2008/03/02/isolasi/>, 4 November 2008

⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses 5 Januari 2009

demokratis, penegakan hukum, hubungan legislatif dan eksekutif yang seimbang. Keseluruh aktifitas tersebut mempunyai tingkat yang rendah di Myanmar karena kediktatoran pemerintahan militer. Sehingga dikenalnya politik isolatif Myanmar pada era kepemimpinan militer.

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penulisan biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran obyektif terhadap fenomena tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana politik Myanmar dibawah pemerintahan militer.
2. Mengetahui alasan mengapa Myanmar bersifat Isolatif dibawah pemerintahan militer.
3. Mengaplikasikan teori-teori yang penulis dapatkan selama proses belajar di perkuliahan.
4. Penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. POKOK PERMASALAHAN

Mengapa Junta militer tetap mempertahankan politik Isolatif di Myanmar?

E. KERANGKA TEORI

1. Model Aktor Rasional oleh Graham T. Allison

Graham T. Allison memberikan gambaran mengenai proses pembuatan keputusan Model yang digunakan adalah Model Aktor Rasional, Model Politik Birokratik. Dalam kasus ini, penulis akan menggunakan Model Aktor Rasional dalam menjelaskan secara rinci tujuan – tujuan mereka, pilihan – pilihan yang tersedia, dan konsekuensi – konsekuensi yang mungkin akan timbul dari tiap pilihan alternative sebelum membuat keputusan.

Dalam model I, yakni AktorRasional, proses pembuatan keputusan dipandang sebagai akibat tindakan – tindakan aktor rasional, terutama suatu pemerintahan yang monopolit, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Pemerintah dianalogkan dengan perilaku individu yang berbalar dan terkoordinasi. Setiap individu melalui beberapa tahap intelektual untuk menerapkan dan menetapkan pilihan atas alternative – alternative yang ada. Maka, unit analisis dalam pembuatan keputusan ini adalah pilihan – pilhan yang diambil oleh pemerintah.⁷

⁷ *Mackey MacLeod, Ilmu Hubungan Internasional, Ditinjau dan Metodologi Jakarta IPRES 1990*

Para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif – alternatif ini menggunakan criteria “Optimalisasi Hasil”. Para pembuat keputusan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaanya melalui beberapa informasi yang diperolehnya dan beberapa sumber yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.⁸

Dengan demikian, maka para pembuat keputusan tersebut mampu menggunakan rasionalitasnya untuk pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil cenderung menyangkut keputusan luar negeri yang dibuat secara rasional. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, maka pembuat keputusan harus mengetahui tujuan dalam melakukan tindakan ini.

Untuk menentukan politik luar negeri, dalam mempelajari proses pembuatan keputusan politik luar negeri, harus diketahui siapa yang ikut bermain, yang mempengaruhi berbagai persepsi pembuatan keputusan, dan bagaimana cara mengagregasikan kepentingan tersebut sehingga menghasilkan suatu keputusan pemerintah yang baik. Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasional dan kita umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan dibuat secara rasional. Karena itulah model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Kebijakan yang diambil atau politik luar yang

Sebagai aplikasi pada penulisan skripsi ini, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan teori Graham T. Allison yaitu Model Aktor Rasional. Model Aktor Rasional dapat menjelaskan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan karakteristik politik Myanmar bersifat Isolatif. Sejak terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Myanmar pada saat itu yaitu Jenderal Ne Win terhadap Perdana Menteri U Nu. Sejak saat itu militer menjadi satu aktor utama yang menjalankan sistem pemerintahan di Myanmar.

Dalam ilmu ketatanegaraan, seharusnya militer ini berkedudukan sebagai alat dari birokrat untuk memaksakan peraturan agar dipatuhi oleh rakyatnya serta bertugas melindungi keamanan negara tersebut dari negara lain. Tetapi di Myanmar posisi birokrasi sebagai alat kapitalis dalam melindungi kepentingan bisnisnya ternyata dirangkap juga oleh militer. Sehingga dalam hal ini militer sebagai aktor yang otoriter dapat mempergunakan kekuatan senjatanya yang tanpa batas untuk pengaturan dan pengawasan rakyatnya guna melindungi kepentingan para kapitalis ini, juga memaksakan kehendaknya untuk mematikan pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah, dan mampu pula dengan senjata memaksa buruh bekerja semaksimal mungkin dengan upah seminimal mungkin.⁹

Sejak tahun 1962 militer menjadi penguasa mutlak di Myanmar hampir semua sektor yang ada di Negara itu, hampir seluruh kebijakan yang dibuat hanya untuk mengedepankan kepentingan militer saja. Pemerintahan Myanmar juga bersifat kedap

yang artinya pemerintah Junta militer tidak peduli dengan aspirasi masyarakatnya apabila masyarakatnya merasa keberatan dengan kebijakan – kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahnya. Pemerintah Junta militer bahkan cenderung memaksakan kebijakannya dengan melakukan tindakan – tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang memberikan perlawanan. Pemerintah militer Myanmar juga tidak mendengarkan kecaman – kecaman yang datang dari dunia internasional.

Oleh karena itu berdasarkan Model Aktor Rasional dapat dianalisa faktor yang menyebabkan politik Isolatif Myanmar dibawah kekuasaan militer yaitu karena adanya kekhawatiran Junta militer akan goyahnya kekuasaan mereka di pemerintahan Myanmar. Pengaruh – pengaruh yang berasal dari luar sebisa mungkin diblokir oleh Junta militer terutama pengaruh – pengaruh yang membuat perubahan bagi sistem politik di Myanmar. Sekarang ini rakyat Myanmar sudah mulai jenuh terhadap pemerintahan militer yang dianggap telah menyengsarakan mereka. Masyarakat Myanmar menginginkan perubahan – perubahan kearah demokrasi. Hal ini sebenarnya sudah tampak sejak tahun 1990 ketika pemilu dimenangkan oleh partai *National League for Democracy* pimpinan Aung San Suu Kyi, serta kalahnya *National Unity Party* yang merupakan wakil dari Junta militer.

Akan tetapi hingga saat ini belum ada peralihan kekuasaan kepada partai yang memenangkan pemilu. Pemerintah militer malah melakukan penekanan terhadap anggota NLD serta siapa saja yang bersifat pro demokrasi. Karena apabila masuknya sistem demokrasi ke Myanmar maka kekuasaan militer pun akan hancur, terlibat

dengan bagaimana pemilu yang merupakan bagian dari demokrasi dimenangkan oleh partai diluar militer.

Negara yang mempunyai sifat politik yang Isolatif juga cenderung melakukan proteksionisme ekonomi. Hal tersebut juga terjadi pada Myanmar, adanya kekuasaan militer yang sangat besar pada perekonomian Myanmar membuat sifat proteksionis terhadap ekonomi ditunjukkan oleh Junta militer. Proteksionisme ekonomi merupakan sistem untuk melindungi perekonomian atau produsen domestik dari intervensi asing. Junta militer melakukan proteksionisme ekonomi yaitu untuk melindungi kekuasaannya pada bidang ekonomi. Dengan tidak membiarkan adanya intervensi asing kedalam perekonomian yang dikusai oleh Junta militer.

Pada masa awal pemerintahan Junta militer mengapus sistem kapitalisme dan menggantikannya dengan sistem sosialisme. Kepentingan Junta militer dalam perekonomian Myanmar sangat besar oleh karena itu mereka cenderung menutup dari dunia internasional untuk menekan pengaruh – pengaruh asing yang dapat dibawa oleh orang – orang yang masuk ke Negara mereka. Pengaruh tersebut seperti dapat munculnya cikal bakal kapitalisme yang akan menghancurkan kekuasaan ekonomi di Myanmar.

Kekuasaan Junta militer yang sangat kuat dalam sistem ekonomi Myanmar tentu saja tidak sesuai dengan konsep kapitalisme dimana pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar. Hal ini tentu akan menggoyahkan kekuasaan Junta

Hal ini tentu akan menggoyahkan kekuasaan Junta

suatu Negara akan mengubah sistem sosial yang telah melekat pada Negara tersebut, dan resiko atas masuknya kapitalisme salah satunya yaitu system demokrasi.

Sifat Isolatif Myanmar tidak serta merta membuat Myanmar sangat tertutup dengan Negara lain. Negara yang dinilai mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Myanmar adalah Cina. Cina merupakan Negara yang berbatasan langsung Myanmar. Cina senantiasa mendukung eksistensi Junta militer Myanmar dengan bantuan – bantuan yang bersifat potensial bagi Junta militer Myanmar. Perusahaan – perusahaan Cina pun diberikan izin oleh pemerintah militer untuk melakukan eksplorasi di Myanmar. Dengan bekerjasama dengan Cina, militer Myanmar mendapatkan keuntungan – keuntungan seperti dukungan untuk mempertahankan kekuasaannya di Myanmar serta memperkuat pertahanan militer.

2. Teori Persepsi

Dalam pengertian bebas, persepsi diartikan sebagai cara pandang seseorang memandang orang lain yang didasarkan oleh pengetahuan dan informasi serta fakta – fakta yang dimiliki seseorang. Persepsi diberikan pada tempat yang penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan persepsi memandu untuk bertindak tanpa menghiraukan apakah persepsi itu benar atau salah, tindakan – tindakan yang kita ambil berdasarkan pada persepsi kita.

Terdapat tiga komponen dalam persepsi, yakni nilai, keyakinan dan pengetahuan. Nilai, merupakan preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu

11

terbukti. Dan pengetahuan adalah bersumber dari data atau informasi yang diterima lingkungan. Bagi para teoritis perceptual, bahwa pengetahuan mengandung komponen subyektif dan obyektif. Fakta tidak berbicara sendiri tapi diberi arti oleh setiap penafsir sesuai dengan titik pandang analitisya sendiri. Kesimpulan mengenai fakta tergantung pada penafsiran terhadap fakta tersebut. Lebih jauh lagi, fakta tidak muncul dari realitas melainkan dari keeping informasi tertentu atas realitas yang diseleksi oleh seorang pengamat sesuai dengan kepentingannya sedang keeping informasi lainnya ditolak karena tidak sesuai dengan kepentingannya.¹⁰

Dalam penerapan teori perspektif pada skripsi ini yaitu bagaimana perspektif Junta militer Myanmar tentang politik Isolatif. Dalam hal ini dimana perspektif militer Myanmar yang memandang bahwa politik isolatif tersebut dapat berpengaruh pada stabilitas nasional serta perekonomian Myanmar. Dalam pandangan militer Myanmar politik Isolatif akan dapat menjaga stabilitas nasional sehingga masyarakatnya tidak adanya pengaruh asing yang akan merusak tatanan politik di Myanmar, yang akan menggoyahkan kekuasaan militer.

F. HIPOTESIS

Junta militer Myanmar bersifat Isolatif karena:

1. Kekhawatiran Junta militer terhadap pengaruh asing yang dapat menggoyahkan kekuasaanya.
2. Untuk mempertahankan dominasi Junta militer di Myanmar.

¹⁰ Winters S. James. *Logika III: Berpikir Nasional I*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 276

3. Ada dukungan terhadap eksistensi Junta militer dalam pemerintahan Myamar.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah ini menggunakan metode deduktif yaitu dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data – data empiris yang ada. Penulisan ini bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder seperti surat kabar, majalah dan tabloid. Penggunaan situs – situs internet sebagai sumber data yang dapat menunjang penulisan skripsi ini

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Untuk membatasi masalah yang dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai **Kepentingan Militer dibalik Politik Isolatif Myanmar** ini dibatasi dengan menggunakan jangkauan waktu yakni sejak tahun 1962 hingga tahun 2008. Namun di beberapa bagian penulisan ini tidak tertutup kemungkinan untuk mengulas berbagai peristiwa pada tahun – tahun sebelumnya untuk kepentingan penelitian. Tahun 1962 merupakan tahun dimana adanya kudeta serta peralihan kekuasaan kepada militer. Sedangkan tahun 2008 merupakan tahun dimana pemerintah Junta militer melalui SPDC telah mengumumkan rencana pelaksanaan pemilu pada tahun 2010

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini adalah akan terbagi kedalam lima bab, hal tersebut dimaksudkan agar permasalahan ini dapat dibahas secara teratur serta saling berkaitan menuju pokok permasalahan, maka sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini mendeskripsikan mengenai alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Dinamika Pemerintahan Militer Myanmar

Pada awal bab kedua menerangkan tentang gambaran umum dari Negara Myanmar dan seperti apakah junta militer tersebut. Setelah itu membahas latar belakang masuknya militer kedalam pemerintahan Myanmar serta membahas bagaimana pemerintahan Myanmar dari model Sosialisme Gaya Burma, SLORC dan SPDC dan bagaimanan kebijakan – kebijakan Junta militer. Bab ini juga membahas berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Junta militer.

BAB III: Politik dan Kekuasaan Junta Militer

Dalam Bab ketiga ini menjelaskan tentang bagaimana politik Isolatif Myanmar dibawah Junta militer dan tututan demokrasi di Myanmar. Bab ini juga membahas bentuk kekuasaan Junta militer terhadap perekonomian Myanmar serta reaksi dunia internasional terhadap pemerintahan Junta militer Myanmar

BAB IV: Faktor – Faktor Penyebab Politik Isolatif Myanmar dibawah Pemerintahan Militer

Bab ini akan menjelaskan faktor – faktor yang menyebabkan adanya politik Isolatif Myanmar dibawah kekuasaan militer.

BAB V: Kesimpulan

Dalam bab terakhir berisi rangkuman atau kesimpulan yang merupakan intisari dari bab – bab sebelumnya yang telah membahas pokok permasalahan yang